

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang didapat oleh pemerintahan daerah, dana tersebut biasanya didapat dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah atau bahkan juga dari pengelolaan kekayaan daerah. Biasanya Pendapatan asli daerah ini juga didapat dari pendapatan asli daerah yang sah, hal tersebut bertujuan untuk memberkan kelulusan dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang mana merupakan sebagai wujud asas *desentralisas*¹².

Menurut Suparmoko *Desentralisasi* diartikan sebagai pengembangan otonomi daerah, sedangkan *Dekosentrasi* diartikan sebagai peyerahan wewenangan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asas *desentralisasi* sendiri merupatakan otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk daerah, dengan kewenangan mengelola

¹² Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), Hal. 99

wilayah daerah sebagai bentuk pengembangan wilayah daerah otonom¹³.

Menurut Wiratna Sujarweni otonomi daerah sendiri merupakan kebebasan yang dimiliki oleh daerah untuk membuat, menyusun peraturan atau rancangan dan melaksanakan kebijakan, bahkan juga dalam hal pengelolaan keuangan daerahnya¹⁴. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, (PAD) pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang didapat berdasar peraturan daerah yang berlaku, sumber pendapatan daerah juga sepenuhnya berasal dari daerah yang bersal dari sumber pendanaan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di suatu daerah¹⁵.

2. Macam-macam Pendapatan Asli Daerah

Dalam hal memaksimalkan pembangunan pemerintah daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan daerah otonom dalam mengelola wilayah daerah secara maksimal dan mandiri dalam kegiatan operasional rumah tangga ataupun pendapatannya. Segala kegiatan operasional berkaitan dengan pendanaan belanja daerah berhubungan dengan pendapatan asli daerah yang akan dialokasikan sebagai anggaran belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah yang bersangkutan. Sehingga sumber dari pendapatan asli daerah (PAD) mempengaruhi berasan dana belaja daerah.

¹³ Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2002), Hal. 18

¹⁴ Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Penerbin Pustaka Baru Press, 2015), Hal. 231

¹⁵ Halim, *Manajemen Keuangan Sektor Publik*, (Jakarta: salemba Empat, 2014), Hal. 67

sumber pendapatan asli daerah (PAD) sendiri merupakan sumber dana daerah yang didapat dalam lingkup daerah tersebut, yang biasanya terdiri dari¹⁶;

a) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi atau pungutan yang dilakukan oleh perorangan atau badan kepada daerah, hal ini bersifat wajib dan memaksa yang mana tanpa mendapat imbalan baik secara langsung¹⁷.

1) Pajak Hotel

Sesuai dengan ketentuan jika terdapat fasilitas hiburan yang menyatu sebagai fasilitas hotel, seperti spa, karaoke, *fintes center* dll, maka akan dikenakan pajak hotel. Pengusaha hotel yang memiliki fasilitas hiburan yang disebabkan oleh tarif pajak hiburan dapat dikenai biaya hingga 75%, sedangkan pajak hotel tanpa fasilitas hiburan hanya dikenai biaya maksimal sekitar 10%¹⁸.

2) Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh piak restoran. Restoran sendiri merupakan fasilitas yang menyediakan makanan atau minuman, yang

¹⁶ Yulianti, *Akutansi Sektor Public Cetakan Kelima*, (Jakarta: Salemba Pustaka, 2000), Hal. 34

¹⁷ P. Maritno Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hal. 6

¹⁸ Himpunan eraturan Perundang-undang Republik Indonesia, *Undang-undang Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015), Hal. 28

dipungut biayaya berupa pembayaran atas makanan atau minuman yang disajikan. Usaha yang mencakup restoran dan dikenai pajak restoran adalah rumah makan, kafetaria, kantin, warung bar, dan degala jenis yang termasuk dalam jasa boga/*catering*¹⁹.

3) Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan pajak yang wajib dibayarkan kepada penyelenggara hiburan. Hiburan yang dimaksud meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, tontonan, atau keramaian yang saksikan banyak orang dengan adanya dipungut biaya²⁰.

4) Pajak Reklame

Pajak reklame sendiri merupakan pajak atas dirikannya reklame. Reklame sendiri merupakan benda atau media yang dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, mempromosikan suatu produk atau jasa. Reklame biasanya dipasang di tempat umum, agar dapat menarik perhatian banyak orang²¹.

5) Pajak Penerrangan Jalan

Pajak penerangan jalan ini diambil dari penarikan hasil penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri atau

¹⁹ Ibid, Hal. 59

²⁰ Raharja Adisasmita, *Pembayaran Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Graha, 2011), Hal. 78

²¹ Ibid, Hal. 78

diambil dari pihak lain. Penggunaan listrik yang dari sumber lain maksudnya menggunakan tenaga listrik yang di distribusikan oleh penyedia tenaga listrik yaitu PLN. Sedangkan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber sendiri maksudnya adalah dengan mengoperasikan secara mandiri, yang biasanya menggunakan generator se (genset) sebagai sumber listrik cadangan saat pemadaman listrik terjadi²².

b) Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pembayaran yang wajib dilakukan oleh perorangan atau badan atas disediakannya suatu jasa tertentu oleh pemerintah. Dalam hal ini mendapatkan timbal balik langsung²³. Retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan yaitu;

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang telah disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan dimanfaatkan oleh pihak umum dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan²⁴

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip

²² Ibid, Hal. 79

²³ P. Maritno Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hal. 9

²⁴ P. Maritno Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), Hal. 21

komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta²⁵.

3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pajak daerah dan juga retribusi merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang dapat meningkatkan dana pendapatan untuk pembangunan daerah. Sumber pendapatan asli daerah selain pajak dan retribusi, ada juga usaha daerah yang sah, yang biasanya dilakukan oleh satu aparat pemerintah daerah yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa²⁶.

3. Faktor-faktor yang dapat Mempengaruhi

Ketika peran (PAD) Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber dana untuk pembiayaan pembangunan daerah masih rendah, maka akan kurang untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Erry rendahnya potensi (PAD) Pendapatan Asli Daerah dapat disebabkan oleh beberapa faktor²⁷, yaitu;

- a) Banyaknya sumber pendapatan di Kabupaten/Kota yang besar, namun tetap digali oleh instansi yang lebih tinggi sehingga pemerintah daerah kurang atau tidak mendapatkan dana pendapatan Kota/Kabupaten.

²⁵ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Hal. 56

²⁶ Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993), Hal. 194

²⁷ Achmad Erry, *9 Kunci Sukses Tim Sukses Dalam Pilkada Langsung*, (Jakarta: Galang Press, 2005), Hal. 54

- b) Pihak BUMN masih belum banyak memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah.
- c) Adanya kebocoran-kebocoran dana atau kolusi.
- d) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kepada pemerintah daerah.
- e) Tingginya biaya pemungutan, sehingga menyebabkan pihak pengguna jasa enggan untuk membayar biaya pungutan.
- f) Adanya kebijakan pemerintah dapat berakibat pada penghapusan atau pengurangan penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah).
- g) Banyak peraturan daerah yang masih perlu disesuaikan dan disempurnakan terkait besaran tarif maupun sistem pemungutan dana.
- h) Masih rendahnya tingkat kemampuan masyarakat untuk membayar pajak²⁸.

Terdapat lima penyebab rendahnya Pendapatan Asli Daerah yang pada akhirnya akan dapat menyebabkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat, antara lain²⁹;

- a) Perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah kurang berkontribusi sebagai pendapatan daerah dan sentralisasi perpajakan yang tinggi.

²⁸ Ibid, Hal. 54-55

²⁹ Kuncoro Mudrajat, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), Hal 13

- b) Meski dalam suatu daerah terdapat bergai jenis pajak daerah, namun hanya sedikit yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan utama daerah.
- c) Adanya kekhawatiran jikadaerah memiliki sumber keuangan yang tinggi, maka akan menyebabkan terjadinya *disentegrasi* dan *separatisme*.
- d) Keadaan akan ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat apabila tersu belangsung akan menyebabkan meningkatnya beban anggaran pada pemerintah pusat.
- e) Sesuai UU No. 33 Tahun 2004 adanya perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah PAD bahwa terdiri dari empat variable yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah³⁰.

B. Dana Perimbangan

1. Pengertian Dana Perimbangan

Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 dalam rangka pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah, pemerintah daerah memiliki sumbe-sumber penerimaan yang terdiri atas Pendapata Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan penerimaan yang sah lainnya. Dana perimbangan sendiri adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

³⁰ Ibid, Hal. 13

melaksanakan pembangunan atau *Desentralisasi*. Pelaksanaan *Desentralisasi* tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan tida dana bagi hasil³¹.

2. Macam-macam Dana Perimbangan

Dana perimbangan bertujuan unruk mengurangi kesenjangan fiskal, berdasar Undang-Undang No. 33 Thaun 2004 dana perimbangan terdri dari;

a) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan. Pengalokasian dilakukan bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka *Desentralisasi*³². Dana alokasi umum menekanka aspek pemeratan dan keadilan. Pemerataan dan keadilan yang dimaksud dimana formula dan perhitungan ditentukan oleh undang-undang. Penggunaan dana alokasi umum dan penerimaan umum harus tetap pada kerangka tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat agar semakin baik, seperti pelayanan bidang kesehatan

³¹ Juli Panglima Saragih, *Disentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) Hal. 127

³² Pipin Syarifin dan Dedeah Jubaedah, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Bandung: CV: Pustaka Setia, 2005), Hal 108

atau pendidikan³³. Terdapat cara untuk menghitung dana alokasi umum (DAU) menurut ketentuan adalah yaitu³⁴;

- 1) Dana Alokasi umum (DAU) ditetapkan paling minim 25% dari penerimaan yang ditetapkan dalam APBN.
- 2) Dana Alokasi umum (DAU) untuk daerah Provinsi dan untuk daerah Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum.
- 3) Dana Alokasi umum (DAU) untuk suatu daerah Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah/kabupaten yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 4) Porsi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia³⁵.

b) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang telah dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu menandadi kegiatan yang bersifat khusus yang berkaitan dengan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas

³³ H.A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jogjakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Hal. 129

³⁴ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012) Hal. 128

³⁵ *Ibid*, Hal. 128-129

nasional³⁶. Terdapat kriteria pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu;

- 1) Kriteria umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang terlihat dari penerimaan APBD setelah dikurangi belanja PNSD³⁷.
- 2) Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur penyelenggaraan terkait otonomi khusus dan karakteristik daerah.
- 3) Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah³⁸.

c) Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang telah dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase dengan tujuan untuk mendaai kebutuhan daerah. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak meliputi, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan. Sedangkan untuk dana bagi hasil yang berasal dari sumber daya alam meliputi dari; kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi,

³⁶ Pipin Syarifin dan Dedeah Jubaedah, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Bandung: CV: Pustaka Setia, 2005) Hal. 108

³⁷ Opcit, Hal. 128-129

³⁸ Ibid, Hal. 129-130

dan pertambangan panas bumi³⁹. Menurut Halim dan Mujib (2009), untuk mengurangi *vertical imbalance* (ketimpangan vertikal) anatar pemerintah pusat dengan pemetrintah daerah maka dilakukan sistem bagi hasil penerimaan pajak antara pemerintah pusat dan daerah. Pendistribusian dana bagi hasil dari pemerintah kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota telah diatur berdasarkan Permendagri⁴⁰.

3. Faktor-faktor yang dapat Mempengaruhi Dana Perimbangan

Adanya dana perimbangan dalam bentuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil telah dapat mengubah struktur dan besaran dana yang APBN yang harus didaerahkan. Secara teori terdapat berberapa faktor dan alasan yang menjustifikasi adanya transfer dana pusat ke daerah, antara lain;

- a) Pemerataan secara vertikal sebagai upaya memperbaiki kemampuan pedapatan
- b) Pemerastaan secara horsontal dengan retribusi antar daerah.
- c) Memperbaiki masalah *Interjurisdictional spillovers*.
- d) Memperbaiki kelemahan administrasi serta mengurangi rantai birokrasi⁴¹.

³⁹ Pipin Syarifin dan Dedeah Jubaedah, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Bandung: CV: Pustaka Setia, 2005), Hal 109

⁴⁰ Halim dan Mujib, *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah*, (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2009), Hal 128.

⁴¹Larry Schroeder dan Paul Smoke, *ntergrovemmental Transfer: Concepts, International Practice, adn Policy Issue* (2003) Hal. 13

C. Petumbuhan Ekonomi

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi adalah proses yang dinamis, dimana proses ini berfokus pada bagaimana dan mengapa pengeluaran, modal, konsumsi, dan populasi manusia berubah seiring berjalannya waktu⁴². Ditekankan pada tiga aspek yaitu proses, peningkatan *output* per kapita dan dalam jangka panjang⁴³. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam Produk Domestik Bruto (PDB)/ Produk Nasional Bruto (PNB) tanpa melihat apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan/ pertambahan penduduk. Istilah pertumbuhan ekonomi sering digunakan untuk menggambarkan perkembangan ekonomi di negara maju sedangkan untuk di negara berkembang istilah yang digunakan ialah pembangunan ekonomi.⁴⁴

Pertumbuhan ekonomi merupakan instrumen paling kuat untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup khususnya di negara-negara berkembang⁴⁵. Pertumbuhan ekonomi adalah proses untuk meningkatkan nilai atau kapasitas ekonomi nasional, yang terlihat melalui indikasi ekonomi makro, khususnya GDP per kapita.

⁴² Daron Acemoglu, *Introduction to Modern Economic Growth* (United States America: Princeton University Press, 2009), Hal. 32

⁴³ Budiono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi* (Yogyakarta: PBF, 1992), Hal. 1

⁴⁴ Muhammad Hasan dan Muhammad Azis, *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal* (Makassar: CV. Nur Lina & Pustaka Taman Ilmu, 2018), Hal. 9-10

⁴⁵ Department of International Development, *Growth: Building Jobs and Prosperity in Developing Countries* (Great Britain: Department of International Development, 2008), hal. 2

Pertumbuhan membawa efek positif pada sektor sosial-ekonomi, dimana perkembangan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan berdampak pada masyarakat melalui peningkatan kualitas standar hidup⁴⁶. Proses dari pertumbuhan ekonomi dapat dilihat juga melalui perubahan kondisi perekonomian di suatu negara yang berkembang ke arah yang lebih baik dalam periode waktu tertentu⁴⁷.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

a) Teori Pertumbuhan Eksogen (*Exogenous Growth Theory*)

Karena tingkat kemajuan ekonomi ditentukan secara eksogen maka teori pertumbuhan *neoclassical* dari Solow disebut juga sebagai teori pertumbuhan eksogen. Teori ini dikembangkan oleh Solow (1956) dimana model pertumbuhan merupakan model akumulasi modal dalam produksi murni ekonomi. Tidak ada harga yang terlibat karena tertarik pada *output* sebagai ukuran pendapatan riil. Tidak terdapat pula pilihan dalam hal pekerjaan/waktu senggang (semua pekerja bekerja) atau tabungan (semua orang menyimpan sebagian pendapatan tetap). Tabungan selalu diinvestasikan. *Output* (pendapatan riil) dibagi antara modal dan tenaga kerja sesuai dengan batasan produk. Akhirnya, tidak ada

⁴⁶ Cesar Calderon dan J. Rodrigo Fuentes, *Government Debt and Economic Growth. Fiscal and Minicipal Management Division* (United States America: Inter-American Development Bank, 2013), Hal.4

⁴⁷ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2011), Hal. 18

pemerintah yang berakibat tidak adanya pajak dan subsidi dan tidak ada perdagangan⁴⁸.

Teori pertumbuhan eksogen pada model Solow bertujuan untuk mengatasi masalah penting dalam model pertumbuhan tanpa teknologi. Dimana *output* per kapita dan modal per kapita tidak tumbuh pada kondisi stabil. Hal ini tidak sesuai dengan bukti empiris, yang menunjukkan bahwa sebagian besar ekonomi maju menunjukkan pertumbuhan variabel per kapita dalam jangka panjang⁴⁹. Teori pertumbuhan eksogen menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh perkembangan faktor-faktor produksi⁵⁰. Pandangan ini dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T)$$

Keterangan:

ΔY = tingkat pertumbuhan ekonomi

ΔK = tingkat pertumbuhan modal

ΔL = tingkat pertumbuhan penduduk

ΔT = tingkat perkembangan teknologi

⁴⁸ Roberth M. Solow, "A Contribution to the theory of economic growth". Quarterly Journal of Economics. Vol. 70 No. 1, 1956, Hal. 68

⁴⁹ Mehmet Ugur, *Modeling Growth: Exogenous, Endogenous and Schumpeterian Growth Models* (London: University of Greenwich, 2016), Hal. 3

⁵⁰ Syaiful Anwar, *Analisis Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi: Sebuah Studi Literatur* (Payakumbuh: Universitas Andalas, 2018), Skripsi, Hal. 41

b) Teori Pertumbuhan Endogen (*Endogenous Growth Theory*)

Teori pertumbuhan endogen menjelaskan pertumbuhan jangka panjang dihasilkan dari aktivitas ekonomi untuk menciptakan pengetahuan teknologi baru. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang dalam teori ini ditentukan oleh kekuatan internal dalam sistem ekonomi yang memberikan kesempatan untuk menciptakan pengetahuan teknologi baru. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi endogen dapat diukur dari tingkat pertumbuhan *output* tiap orang, bergantung pada tingkat pertumbuhan dari total faktor produktivitas (TFP), dimana hal tersebut ditentukan oleh tingkat perkembangan teknologi modern yang digunakan dalam proses produksi⁵¹.

Dalam teori ini, pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Dimulai dengan observasi pada perkembangan teknologi melalui inovasi, bentuk, proses dan pasar dari produk baru yang kesemuanya merupakan hasil dari aktivitas ekonomi⁵². Paul Romer merupakan pelopor dari teori pertumbuhan endogen. Prinsip utama dalam teori pertumbuhan endogen adalah penghapusan asumsi *decreasing return to capital*. Untuk membenarkan penyimpangan dalam asumsi ini, Romer dan para pengikutnya telah memperluas definisi modal untuk melibatkan

⁵¹ Philippe Aghion dan Peter Howitt, *Endogenous Growth Theory* (3rd ed.). (United States America: Massachusetts Institute of Technology, 1999), Hal. 22-24

⁵² Philippe Aghion dan Peter Howitt, *Endogenous Growth Theory*...., Hal. 22-24

modal manusia dan modal pengetahuan⁵³. Menurut Romer (1994), teori pertumbuhan endogen mempunyai tiga elemen dasar, yaitu⁵⁴:

- 1) Adanya proses akumulasi ilmu pengetahuan secara endogen yang menciptakan perubahan teknologi.
- 2) Karena mekanisme *knowledge spillover* dari proses akumulasi ilmu pengetahuan memunculkan penciptaan ide dan inovasi baru oleh perusahaan.
- 3) Karena perkembangan ilmu pengetahuan menyebabkan pertumbuhan tanpa batas pada produksi barang-barang konsumsi.

Pada model pertumbuhan endogen, fungsi produksi digambarkan dalam formula sebagai berikut:

$$Y = F(R, K, H)$$

Keterangan:

Y: Total Output

R: Penelitian dan Pengembangan (R&D)

K: Modal Fisik

H: Akumulasi Modal

3. Indikator yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

⁵³ Jeffrey Parker, *5 Theories of Endogenous Growth* (Fiji: University of the South Pacific, 2012), Hal. 2

⁵⁴ Paul M. Romer, "The Origin of Endogenous Growth". *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 8 No. 1, 1994, Hal. 3-22

Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut⁵⁵:

a) Tanah dan Kekayaan alam lainnya

Kekayaan alam yang dimiliki suatu negara dapat mempermudah usaha dan mempercepat perkembangan ekonomi. Potensi kekayaan alam suatu negara dapat dikembangkan untuk mencapai keuntungan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat.

b) Jumlah Penduduk dan Kualitas Tenaga Kerja

Peningkatan jumlah penduduk suatu negara sejalan dengan peningkatan jumlah tenaga kerja. Hal ini mengakibatkan adanya penambahan produksi. Di sisi lain, dengan adanya pendidikan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan kerja. Kualitas tenaga kerja yang meningkat akan meningkatkan produktivitas. Hal ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

c) Barang-barang Modal dan Tingkat Teknologi

Peningkatan jumlah barang-barang modal apabila tidak diiringi dengan kemampuan teknologi, maka pertumbuhan ekonomi tidak akan secepat yang diharapkan. Teknologi membantu manusia untuk mengolah barang-barang modal dan meningkatkan nilai jualnya dalam waktu relatif singkat. Perkembangan teknologi

⁵⁵ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar (3rd ed.)* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011), Hal. 332

memegang peranan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.

d) Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat

Ahli ekonomi menunjukkan bahwa sistem sosial dan sikap masyarakat merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Sikap masyarakat menentukan sampai dimana tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dicapai.

D. Kinerja Keuangan Pemerintah

1. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah

Kinerja keuangan merupakan hasil penilaian kondisi keuangan suatu perusahaan pada periode waktu tertentu⁵⁶. Menurut Sucipto kinerja keuangan merupakan pengukuran tertentu untuk mengukur keberhasilan kinerja suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan⁵⁷. Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), kinerja keuangan diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya⁵⁸. Kinerja keuangan digunakan sebagai dasar bagi suatu perusahaan dalam melakukan pengambilan keputusan manajemen baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang⁵⁹. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan

⁵⁶ Elma, *Analisis Kinerja Keuangan sebagai Dasar Pengambilan Keputusan di Bidang Keuangan pada PT.Semen Tonasa di Kabupaten Pangkep* (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2016), Skripsi, Hal. 8

⁵⁷ Sucipto, "Penilaian Kinerja Keuangan". *Jurnal Akuntansi*, 2003, Hal. 34

⁵⁸ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan* (2007 ed.) (Jakarta: Salemba Empat, 2007), Hal. 18

⁵⁹ Ni Nengah Mudiartini, "Analisis Kinerja Keuangan sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Investasi pada Hotel Amankila Resort, Desa Manggis, Karangasem". *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, Vol. 5 No. 1 Hlm. 1-10

salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.⁶⁰

Dalam melakukan asesmen (pengukuran) terhadap kinerja keuangan, penting untuk melihat laporan keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan (*financial statements*) merupakan langkah utama dalam melakukan asesmen kinerja keuangan. Tinjauan mengenai laporan keuangan dapat dilakukan dengan melihat posisi keuangan dan hasil terbaru dari suatu perusahaan yang kemudian dapat ditindaklanjuti dengan melakukan asesmen kinerja keuangan⁶¹.

2. Macam-macam Alat Ukur Kinerja Keuangan Pemerintah

Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dengan menggunakan beberapa alat analisis seperti: (1) rasio likuiditas, yaitu dengan mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada tenggat waktu yang ditentukan; (2) rasio solvabilitas (*leverage*) yaitu rasio untuk mengukur seberapa jauh dana pinjaman digunakan untuk membiayai suatu perusahaan; (3) rasio profitabilitas/ rentabilitas, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (laba); (4) rasio aktivitas usaha, yaitu untuk mengukur tingkat efektivitas perusahaan dalam pemanfaatan sumber dana perusahaan; (5) rasio penilaian/ pasar, yaitu

⁶⁰ Abdul Halim, Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah. (Jakarta: Salemba Empat 2016), Hal.24

⁶¹ Rory Knight dan Marc Bertoneche, *Financial Performance* (Great Britain: Reed Educational and Professional Publishing Ltd, 2001), Hlm. 3-4

untuk mengukur pengakuan pasar terhadap kondisi keuangan perusahaan; (6) rasio efisiensi, yaitu jumlah relatif permasukan yang digunakan untuk mencapai tingkat pengeluaran tertentu dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan dan *input* yang digunakan (*cost of input*); (7) rasio efektivitas, yaitu hubungan antara *output* dengan target yang harus dicapai. Dapat diartikan bahwa semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian target, maka semakin efektif proses kerjanya⁶².

3. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

a. Indikator Masukan (Inputs)

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya: jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan.

b. Indikator Proses (Process)

Indikator proses adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya: ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.

c. Indikator Keluaran (Output)

⁶² Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Hal.

Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Misalnya: jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.

d. Indikator Hasil (Outcome)

Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya: tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai.

e. Indikator Manfaat (Benefit)

Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya: tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.⁶³

E. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan tingkat pencapaian dari hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan melalui kebijakan atau ketentuan perundangundangan selama satu periode tertentu. Selama periode tersebut, pemerintah diharapkan mampu menghasilkan kinerja yang optimal dengan rancangan anggaran yang telah ditetapkan dan disahkan sebelumnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja

⁶³ Mohammad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: BPF, 2006), Hal.196

Daerah adalah ruang lingkup keuangan daerah pada tingkat pemerintah daerah yang terdiri dari tiga komponen, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

F. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Dana Perimbangan yang diterima pemerintah daerah dimanfaatkan sesuai dengan tujuan utama dari diterimanya dana tersebut, dan juga diimbangi dengan meningkatnya infrastruktur, fasilitas, sarana dan prasarana publik yaitu dengan mengalokasikan penerimaan tersebut untuk meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat maka akan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat guna memenuhi kebutuhan daerahnya.

G. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Kinerja keuangan pemerintah dapat diukur dari seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki daerahnya sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya. Kinerja keuangan pemerintah daerah pada penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio pertumbuhan pendapatan daerah. Rasio pertumbuhan pendapatan daerah dapat menunjukkan seberapa besar kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan

pendapatannya dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin tingginya pertumbuhan pendapatan daerah dan bernilai positif setiap tahunnya mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerahnya. Pertumbuhan pendapatan daerah mengalami kenaikan setiap tahunnya menyebabkan pemerintah daerah mampu memenuhi segala kebutuhan daerahnya dan memberikan indikasi bahwa keuangan daerah telah mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah.

H. Penelitian Terdahulu

Guna mendukung penelitian ini, peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan terkait permasalahan yang akan diteliti, sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Chrisna Dwi Heryanti yang bertujuan mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian menggunakan kuantitatif dengan alat SPSS 24. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan dan belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Persamaan penelitian ini terdapat pada

metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Perbedaan terdapat pada alat bantu yang digunakan yaitu program SPSS, sedangkan penelitian saya menggunakan program Eview.⁶⁴

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ihsan Wahyudin, yang bertujuan mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah, variable dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah, variable belanja modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Persamaan penelitian ini terdapat pada metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dan variabel X1, X2 dan Y yang digunakan. Sedangkan perbedaan terdapat pada variabel X3 yang tidak terdapat pada penelitian saya.⁶⁵

⁶⁴ Chrisnadwiheryanti,dkk, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur*, (Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, Volume 3, Nomor 1, 2019)

⁶⁵ Ihsan Wahyudin dan Hastuti, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat*, (Indonesian Accounting Research Journal, Vol.1, No.1, 2020)

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fisa Aprilia Muhayanah⁶⁶, yang bertujuan untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2013. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh laporan realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Sampel penelitian ditentukan dengan metode purposive sampling. Sampel yang digunakan adalah 61 selama 2 tahun digunakan adalah 61 selama 2 tahun. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil model penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah; Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah; Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan metode kuantitatif. Perbedaan penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian yang

⁶⁶ Fisa Aprilia Muhayanah, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2013, (Publikasi Ilmiah, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, 2016)

digunakan yaitu pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Novia Indrawati Putri, yang bertujuan mengetahui Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penentuan sampel melalui metode sampling jenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan metode kuantitatif. Perbedaan penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian yang digunakan yaitu pada provinsi bali.⁶⁷
5. Penelitian yang dilakukan oleh Sandi Hasudungan Pasaribu, yang bertujuan mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi papua barat. Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan

⁶⁷ Ni Kadek Novia Indrawati Putri, dan Ni Putu Ayu Darayanti, *Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali*, (E-Jurnal Manajemen, Vol.8, No.5, 2019)

metode kuantitatif. Perbedaan penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian yang digunakan yaitu pada provinsi papua barat.⁶⁸

6. Penelitian yang dilakukan oleh Yunus Harjito, yang bertujuan mengetahui Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAK berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan metode kuantitatif. Perbedaan penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian yang digunakan yaitu pada pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia.⁶⁹
7. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Gina Sukma Antari, yang bertujuan mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, belanja modal berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Persamaan penelitian ini terdapat pada metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian

⁶⁸ Sandi Hasudungan Pasaribu, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat*, (Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol.4, No.2, Juni 2020)

⁶⁹ Yunus Harjito *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Indonesia*, (Jurnal Akuntansi dan Ekonomi FEB UN PGRI Kediri, Vol.5, No.1, 2020)

kuantitatif. Perbedaan penelitian ini terdapat pada analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda.⁷⁰

8. Penelitian yang dilakukan Armaja bertujuan untuk menguji pengaruh kekayaan daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah baik secara bersama-sama maupun secara terpisah terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2011-2015 yang berjumlah 23 Kabupaten/Kota sehingga jumlah pengamatan sebanyak 115 pengamatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota-Perubahan (APBK-P) 23 Kabupaten/Kota di Aceh periode 2011-2015. Sedangkan teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data sekunder. Metode analisis yang digunakan yaitu Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan daerah, Dana Perimbangan, dan belanja daerah baik secara bersama-sama maupun secara terpisah berpengaruh terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh. Persamaan penelitian ini terdapat pada metode penelitian yang digunakan

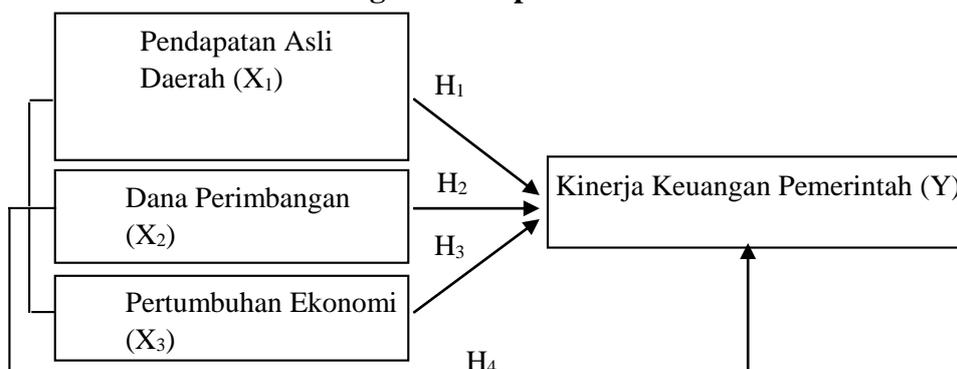
⁷⁰ Ni Putu Gina Sukma Antari, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*, (E-Jurnal Manajemen Unud, Vol.7, No.2, 2018)

yaitu penelitian kuantitatif. Perbedaan penelitian ini terdapat pada analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda.⁷¹

I. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau konsep berpikir ini disajikan untuk mempermudah penulis dalam menganalisis dari tujuan penelitiannya yang diangkat. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat disajikan berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Sumber: Gambar diolah peneliti, 2021

Kerangka konseptual berfungsi untuk memudahkan peneliti untuk memperjelas dan menekankan pada akar pemikiran yang akan dibahas dalam penelitian ini. Hubungan-hubungan antar variabel di atas dijelaskan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah merupakan variabel Y, dan variabel Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel X1, Dana Perimbangan sebagai variabel X2, dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel (X3). Dalam penelitian ini variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi akan diuji

⁷¹ Armaja, *Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan*, (Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol.3 No.2 September 2015)

kebenarannya apakah terdapat pengaruh terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah, yaitu dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

J. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan teori, penelitian-penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual, maka kita dapat mengetahui hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yang diajukan antara lain:

1. H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.
2. H2: Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.
3. H3: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.
4. H4: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah